V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada Perkara Nomor 452 Pid. Sus/2014/PN.Tk. dan Nomor 965/Pid.B/2014/PN.Tjk terhadap anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 332 Ayat (1) ke 1 dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Selain itu Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Akan tetapi dakwaan dan tuntutan pidana tidak memberlakukan ketentuan terkait perbarengan melakukan tindak pidana (*consursus*) yang diatur dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Selain alat bukti hakim juga harus tetap memperhatikan barang bukti yang juga diajukan didepan persidangan. Pertimbangan yuridis dilakukan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, sedangkan pertimbangan non-yuridis digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. selain itu juga hakim memperhatikan teori keseimbangan, teori seni dan intuisi dan teori yang berkaitan dengan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 452 Pid. Sus/2014/PN.Tk dan Putusan Nomor 965/Pid. B/2014/PN.Tjk yaitu sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkannya pendidikan agama, moral, pengawasan terhadap anak atau remaja agar menjadi generasi muda yang baik dimasa depan, serta diperlukan peran keluarga dan masyarakat dan perangkat hukum dapat bertindak secara tegas berdasarkan undang-undang dalam menangani kasus ini agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.
2. Dalam memutuskan pembedaan hakim hendaknya benar-benar melihat semua aspek berdasarkan hukum, kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan.